

Peran Elit Pemerintah dalam Proses Penataan dan Pemberdayaan PKL Taman
Pinang Kabupaten Sidoarjo
Ariq Muhammadi*

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah merupakan sebuah wujud kebaikan bersama yang telah disepakati untuk di implementasikan. Dalam prosesnya, implementasi kebijakan yang diterapkan tentu tidak terlepas dari konflik masyarakat antara yang menolak dan menerima. Sehingga dari hal tersebut berdampak pada tingkat keberhasilan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kota yang mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Munculnya Perda tersebut merupakan salah satu tuntutan masyarakat dikarenakan Perda sebelumnya tidak memihak kepada kalangan pedagang kaki lima. Dalam teori, Merilee S. Grindle mengatakan bahwa suatu kebijakan dapat ditentukan konten dan konteks yang berpengaruh dalam sebuah kebijakan. Namun bagaimana pun munculnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari elit pemerintah yang menjadi representasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mencari informasi dan menggunakan analisis teori implementasi kebijakan untuk mengupas fenomena yang sedang terjadi, yaitu konflik kepentingan antara masyarakat dan elit pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Sidoarjo sebagai kota UKM.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Konflik, Elit Pemerintah dan Pedagang Kaki Lima.*

The Role of Government Elite In The Process Of Structuring and Empowering PKL Taman
Pinang Sidoarjo Regency

ABSTRACT

In some occasions, government policy can be the solution that is necessary to be implemented, even though the process of the policy implementation might inevitably create pro and contra. Therefore, the government's success rate is measured from whether the policies meet the needs of the communities or not. Sidoarjo regency is one of the cities that issued policy of Regulation No.3 Year 2016 about Arrangement and Improvement of Street Traders. The policy was regulated as the community's demand since the previous policy was considered to not meet the community's needs. In a theory proposed by Merilee S. Grindle, it is said that a policy is a strategy for a problem solving. On the other hand, the policy regulation is found to be highly associated with the government elites as the representation of the people in the making process. This study used qualitative method in gathering the data. The theory of policy implementation was employed to analyze the data in order to examine the current phenomenon, namely the conflict of interest between the society and elite government Sidoarjo in the arrangement and improvement of the street traders in Taman Pinang.

Keywords: *Policy Implementation, Conflict, Government Elite and Street Traders.*

*Peneliti adalah mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ariqmuhammadi@gmail.com

Pendahuluan

Dewasa ini, pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di sektor informal di kota Indonesia. Menurut banyak ahli, pertumbuhan dalam sektor informal memiliki kecenderungan dengan dikarenakan lemahnya kemampuan sektor formal dalam mengakomodir angkatan kerja. Disisi lain pertumbuhan angkatan tenaga kerja menjadi dampak dari adanya proses imigrasi yang selalu melonjak pesat berbanding terbalik dengan kesediaan lapangan kerja dampaknya pengangguran terjadi pembengkakan sektor informal menasar pada penduduk kalangan usia muda.² Dewasa ini, sektor informal menjadi sumber permasalahan terutama pada temoat-tempat strategis. Akan menimbulkan ketidakindahan perkotaan dan berdampak pada lingkungan dan kemacetan.

Jawa timur sebagai provinsi yang memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Sidoarjo sebagai salah satu kota yang menjadi incaran banyak para pendatang, tentu daya tarik itu juga disebabkan oleh letak geografis Kota Sidoarjo yang berdekatan dengan ibu kota Provinsi yaitu Surabaya. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang datang ke daerah ini dengan tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan atau atau sektor formal yang ada. Dampaknya banyak masyarakat yang mencari peruntungan di Sidoarjo dengan cara lain, yaitu menjadi pedagang kaki lima (PKL).

Adanya peluang pekerjaan untuk menjadi PKL tentu menjadi peluang ekonomi bagi mereka yang tidak dapat masuk disektor pekerjaan formal. Namun peluang tumbuhnya jumlah PKL di sebuah kota, tentu tidak hanya berdampak positif dalam mengurangi lapangan pekerjaan tetapi juga mempunyai dampak negatif, terutama berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan penduduk, yang lokasi tempat tinggalnya menjadi tempat berjalannya aktivitas perekonomian informal dari pedagang kaki lima. Sehingga dengan adanya dilema ini tentu peran pemerintah harus bisa hadir dalam menyelesaikan permasalahan, sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam otoritas pembuatan kebijakan.

Tentu sebelum mengeluarkan dan mengimplementasikan sebuah kebijakan, pemerintah harus bisa melihat titik temu solusi yang tidak akan tumpang tindih dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai Kota UKM Sidoarjo pasti tidak terlepas dari sektor perekonomian informal yang di dalamnya terdapat peran dari kelompok PKL. Jadi ketika proses implementasi kebijakan pemerintah terlalu menyudutkan dan membatasi ruang gerak dari aktivitas

²Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

perekonomian informal ini, maka hal itu juga akan berdampak pada citra Kota Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan sebagai Kota UKM di Jawa Timur.

Kebijakan merupakan solusi dalam penataan PKL Sidoarjo untuk mewujudkan keadilan bagi terselenggaranya proses ekonomi daerah. Karena bagaimana pun peran PKL dalam sektor ekonomi informal sangat berpengaruh dalam menumbuhkan potensi ekonomi kerakyatan, jadi bila potensi ini tidak diakomodir oleh para pemangku kebijakan, terkhusus para elit pemerintah yang mereka sendiri sebenarnya dipilih oleh rakyat, maka yang terjadi selanjutnya adalah hilangnya legitimasi dari para elit dan tentu hal tersebut akan berdampak pada terselenggaranya implementasi kebijakan yang lain terkhusus di Kota Sidoarjo.

Jadi oleh karena itu pentingnya implementasi kebijakan yang tepat oleh elit dalam melakukan pemberdayaan kepada PKL melalui fasilitas pemerintah sangatlah penting. Bagaimana pun kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pengakomodiran para PKL ini melalui kebijakan yang sesuai sehingga dengan kehadiran tersebut. Masyarakat terkhusus dari kalangan PKL merasa mendapatkan perhatian juga dari para elit pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan visi-misinya.

Dari kumpulan teori implementasi kebijakan yang telah dijabarkan penulis diatas. Banyaknya teori implementasi yang muncul. Namun dari sekian banyak jumlah teori implementasi kebijakan tersebut, ditambah dengan semakin tak terbendungnya kemunculan literatur dari berbagai akademisi untuk mengkritisi temuan penelitian, belum terlihat jelas seberapa jauh perkembangan teori implementasi kebijakan tersebut dapat dijabarkan secara tajam sampai detik ini. Jika dilihat dari banyaknya penelitian dan pengembangan lanjutan tentang kajian tentang studi implementasi kebijakan melalui literatur yang masih banyak membahas tentang bagaimana implementasi itu berjalan secara semestinya dan senyatanya.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis terdapat beberapa studi terdahulu yang telah melakukan kajian pustaka terhadap pengumpulan literatur implementasi kebijakan menjadi sebuah skripsi.³ Seperti yang dibahas pada skripsi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sidoarjo. Dalam skripsi Cintatya Cindy Bilqisa mengumpulkan dan menjelaskan teori Merilee S. Grindle yang menjadi salah satu bagian dari teori implementasi kebijakan yang kurang tajam mengupas faktor-faktor apa saja membuat sebuah kebijakan itu tidak dapat berjalan dengan semestinya dan senyatanya.

³Cindy, Cintatya, 2013. Skripsi. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sidoarjo*: Universitas Negeri Airlangga.

Studi terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Adimas Ramadhan.⁴ Penelitian yang berjudul Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur. Di dalam penelitian ini membahas teori implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle penelitian yang mereka lakukan menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh kontens kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut salah satunya adalah pelaksana dan sumber daya yang dikerahkan.

Studi terdahulu yang ketiga yakni penelitian yang dibuat oleh Sitta Aulia.⁵ Penelitian yang berjudul Desentralisasi Kebijakan Pendidikan dari Universitas Airlangga, Surabaya. Di dalam penelitian tersebut mengkritik dalam penyusunan dan implementasi kebijakan tentunya merupakan proses yang melibatkan banyak aktor. Kebijakan yang sudah tersusun dalam program-program tentu saja banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan alokasi khusus dari sumber daya publik dan beberapa aktor lainnya berusaha mempengaruhi keputusan yang di ada di dalam teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Studi terdahulu yang keempat yakni peneiltian yang dibuat oleh Puguh Budiono.⁶ Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor) dari Universitas Airlangga, Surabaya. Di dalam peneiltian tersebut membahas implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle yang mengkritik Isi atau konten kebijakan telah mengatur secara rinci mengenai proses pembentukan sampai dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan, implementasi kebijakan selalu melibatkan aktor. Aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang mempengaruhi hasil kebijakan. Adanya kepentingan individu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menghambat kebijakan.

Studi yang terakhir yakni penelitian yang di kupas oleh Anita Tressya Rumpopoy.⁷ Penelitian yang disingkat di dalam jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah

⁴Ramadhan, Adimas, 2012. Jurnal Politik Muda. *Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur*: Universitas Negeri Airlangga.

⁵Aulia, Sitta, 2012. Jurnal Politik Muda. *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)*: Universitas Airlangga.

⁶Budiono, Puguh, 2015. Jurnal Politik Muda. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*: Universitas Airlangga.

⁷Rumpopoy, Tressya, Anita. 2012. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoaro*: Universitas Airlangga.

dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo dari Universitas Airlangga, Surabaya. Di dalam penelitian tersebut tidak tajam membahas konteks apa saja yang membuat implementasi sebuah kebijakan dapat tidak berjalan semestinya yang ada di implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Suatu kebijakan yang pada tujuannya untuk mencapai kebaikan bersama dapat disebut dengan implementasi kebijakan. Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses bagaimana sesuai atau tidaknya implementasi yang telah di gagas bersama yang dapat dinilai dari publik itu sendiri dalam menerjemakannya. Model atas bottom up yang digagas oleh Merilee S. Grindle. Yang dikenal dengan implementasi adalah sebuah proses politik dan administrasi. Menurut para ahli ada dua jenis yang berdampak pada pengaruh suatu implementasi kebijakan publik. Parameter berhasilnya sebuah implementasi kebijakan bisa di ukur dari bagaimana capaian akhir hasil implementasi, yaitu dengan tercapai atau tidak tujuan dari kebijakan tersebut. Parameter itu meliputi satu proses bagaimana pelaksanaan kebijakan apakah sesuai dengan grand desain dengan merujuk pola kebijakannya. Dua tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan tersebut. Impak atau efek yang dirasakan masyarakat baik individu maupun golongan serta tingkat perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut menjadi faktor pengukur dimensi keberhasilan.⁸

Intervensi turut menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan, sehingga implementasi kebijakan dan intervensi adalah dua tindakan yang saling bersinggungan. Setelah implementasi melalui proses perumusan langkah berikutnya adalah bagaimana kebijakan itu dikelola, menciptakan tujuan bersama melalui kepemimpinan pengendalian serta pengawasan menjadi bagian dalam proses pengelolaan kebijakan dalam sebuah organisasi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang pertama ada konten di dalam kebijakan menurut Grindle adalah Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, Tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, Program pelaksanaan program, dan sumber daya yang digunakan. Setelah itu yang kedua ada konteks di dalam kebijakan menurut Grindle adalah kekuatan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

⁸Agustino, leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik; formulasi, implementasi dan evaluasi*, Bandung :CV Alfabeta.

Kebijakan yang sudah ditetapkan pelaksanaannya dan dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau suatu konteks yang ditetapkan bersama, maka dalam hal tersebut dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat mengetahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu keadaan lingkungan dan individu serta kelompok, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Pendekatan atas dan bawah, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh pemerintahan yang tersentralisir dari pusat. Atas dan bawah sendiri berasal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di bawah warga atau masyarakat yang merasakan sendiri tentang persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Yang pada dasarnya pendekatan atas dan bawah adalah model implementasi kebijakan berada di bawah tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sebuah kultur sosial yang ada sehingga mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.⁹

Kondisi Pedagang Kaki Lima Taman Pinang

Di dalam sejarah panjangnya di tahun 2010. Para para penjual dagangan di perumahan Taman Pinang yang awalnya hanya segelintir saja yang menggunakan fasilitas umum, yang kebanyakan terdiri dari penjual kue leker dan jamu tradisional. Hal ini di gunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan di ruas jalan tersebut dikarenakan mudahnya akses bagi pembeli untuk langsung membeli sehingga tidak sampai turun dan memakirkan kendaraanya dan juga para pedagang kaki lima dekat dengan rumah daerah mereka sendiri dan menguntungkan para pedagang kaki lima sendiri. Dan pada waktu itu sepanjang jalan Taman Pinang tidak padat penduduk perumahan saja yang melintasi jalanan tersebut. Dalam berkembangnya waktu sewaktu pedagang yang baru masuk di dalam kawasan Taman Pinang karena pada waktu itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan yang melarang para pedagang kaki lima untuk berjualan di perkotaan, yakni Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah menetapkan kebijakan itu untuk merelokasi para pedagang tersebut yang membuat para pedagang tersebut direlokasi di daerah GOR yang dekat dengan lokasi pedagang kaki lima yang sebelumnya yakni dikawasan alun-alun. Para pedagang kaki lima tersebut merasa berdagang di kawasan GOR Sidoarjo tidak sebanding dengan apa yang di dapat ketika mereka berjualan di kawasan alun-alun Sidoarjo sehingga mereka berpindah ke daerah dekat GOR yang lebih menguntungkan pedagang kaki lima seperti Taman Pinang.¹⁰

⁹*Ibid*, Hal 154-157.

¹⁰Hasil wawancara peneliti bersama Pembina Paguyuban pedagang kaki lima Sidoarjo Sumi Harsono di kawasan taman pinang.

Di dalam daerah perumahan Taman Pinang tersebut mereka para pedagang kaki lima mendapatkan kekuatan dari Paguyuban Pedagang Kaki Lima yakni sebuah wadah bagi para pedagang agar mereka dapat berjualan di lokasi Taman Pinang dengan sesuai kesepakatan dari pihak pemerintah dan juga perwakilan para pedagang kaki lima tersebut. Namun tidak semua para pedagang kaki lima tergabung di dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima. hal itu dikarenakan karena para pedagang kaki lima berharap ingin berjualan setiap hari di lokasi itu yang akhirnya ketika mereka sedang berjualan tidak sesuai dengan hari yang disepakati mereka selalu berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun Sat Pol PP mengakui bahwa ketika mereka sedang melakukan pekerjaannya mereka hanya memberikan peringatan saja agar tidak berjualan di lokasi tersebut dan tidak sampai membawa barang dagangan para pedagang kaki lima. para pedagang sendiri kebanyakan tidak begitu jauh dari kawasan mereka berjualan dari tempat tinggalnya. Namun ada sebagian juga pedagang yang dari luar Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu sebenarnya disadari oleh para pedagang sendiri bahwasannya ketika mereka berjualan di kawasan tersebut sebenarnya tidak boleh berjualan sampai melampaui batas dagangannya atau tidak sampai membawa kendaraan agar tidak mengganggu para pengendara roda dua dan empat ketika melintasi jalanan tersebut. Tetapi dilihat sampai saat ini masih banyak pedagang yang menggunakan kendaraan roda dua, tiga dan empatnya untuk mereka berdagang. Memang kawasan tersebut sebelumnya tidak ada larangan karena hanya pedagang kecil yang menggunakan gerobak dan sepedannya untuk berjualan sampai dengan adanya penolakan dari warga sekitar yang semakin resah karena pedagang semakin tahun semakin meningkat karena pedagang yang bermunculan tidak hanya memakai gerobak dan sepedanya saja hal itu menimbulkan kemacetan dan kotor di sekitar lingkungan kawasan taman pinang.

Para pedagang banyak memilih untuk berjualan di lokasi tersebut dikarenakan tempatnya yang mudah di akses oleh banyak pembeli. Berjualan di lokasi tersebut memang sangat menguntungkan para pedagang tidak usah menunggu lama untuk berjualan. Dalam waktu sehari mereka sudah dapat menjual dengan barang dagangannya mudah dan cepat. Hal itu bisa terjadi karena jalanan tersebut pada dengan kendaraan roda dua dan empat yang melintas sampai ke jalan candi Sidoarjo.

Taman Pinang mulanya adalah lokasi hunian tempat tinggal warga, sampai pada tahun 2014 mulai bermunculan banyak pedagang sejak adanya kebijakan pemerintah yang merelokasi Alun-alun sidoarjo yang berdampak pada ketidakuntungan para pedagang kaki lima. Dan menimbulkan adanya reaksi luapan warga yang muncul yang menyebabkan benturan antara warga masyarakat dengan warga pedagang kaki lima. Untuk mengobati keresahan warga sendiri pihak pemerintah mendatangkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk menentibkan

pedagang kaki lima, akan tetapi sampai sekarang warga sendiri memandangkan pemerintah hanya setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya warga sendiri yang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dengan banyak upaya salah satunya sampai menutup jalan kawasan perumahan Taman Pinang.

Konflik PKL Taman Pinang

Adanya sebuah kebijakan pemerintah dalam melakukan sebuah penataan kota tentu disebabkan karena munculnya tuntutan dari masyarakat. Dimana munculnya tuntutan itu disebabkan adanya konflik yang tidak terselesaikan, terkhusus dari kalangan pedagang kaki lima Sidoarjo. Konflik PKL yang terjadi awalnya muncul karena relokasi pemerintah yang memindah tempat berjualan para pedagang ini ke tempat sepi. Sehingga dari pemindahan itu muncul kerugian yang menyebabkan pedagang PKL kehilangan untung, karena hal itu maka akhirnya para pedagang yang sebelumnya dipindah akhirnya mereka mencari lokasi yang menguntungkan mereka, dan otomatis terjadinya hal tersebut berdampak pada ketertiban Kabupaten Sidoarjo, terutama di wilayah Taman Pinang.

Munculnya aktivitas PKL Taman Pinang tidak hanya mengganggu ketertiban namun juga mengganggu kenyamanan warga sekitar tempat berjualan. Pola berjualan para pedagang PKL yang tidak pernah mengenal waktu tentu membuat para warga menjadi resah sehingga dari keresahan warga taman pinang terhadap pola aktivitas PKL ini memunculkan konflik baru yaitu antara warga dengan pedagang kaki lima Taman Pinang. Konflik yang muncul dari keresahan warga pun tidak terhindarkan, sehingga banyak aksi yang dilakukan warga untuk mengusir PKL dari tempat berjualannya. Diantaranya melakukan pemasangan portal di area tempat PKL, penyewaan TNI, Polisi dan Satpol PP untuk mengusir PKL, dan dari hal tersebut tak jarang terjadi perlawanan dari para PKL itu sendiri.

Bermunculnya kepentingan yang berbeda antara kelompok individu dengan yang lain menjadikan pemicu munculnya kepentingan yang mengakibatkan kepentingan adalah sesuatu yang dapat membuahkan konflik, apalagi dalam kepentingan prihal PKL ini juga masalah ekonomi yang menyangkut keberlangsungan hidup keluarga para pedagang. Otomatis dengan adanya kepentingan ekonomi yang bersifat fundamental bagi PKL membuat konflik yang terjadi antara PKL dengan warga maupun PKL dengan pemerintah terus berlanjut. Dan dengan adanya kondisi ini Kabupaten Sidoarjo semakin mengalami kesulitan dalam mengkondisikan ketertiban kotanya, selain pemerintah juga mempunyai kepentingan yang menyangkut Sidoarjo sebagai kota UKM.

Ditambah kasus kepentingan yang terjadi di Taman Pinang yang saling memiliki perbedaan kepentingan antara warga yang ingin tempat tersebut dikembalikan lagi seperti

fungsinya sebagai jalan untuk mendapatkan ketertiban, sedangkan paguyuban pedagang kaki lima sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi pedagang kaki lima yang mempunyai keinginan yang lain untuk menempati lokasi tersebut untuk para pedagang mencari rejeki. Dan pemerintah sebagai penengah dan institusi negara yang tidak memberikan kejelasan terhadap masalah tersebut dalam mengelola jalan Taman Pinang. Dari ketiga kepentingan ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan tidak selalu berbeda maupun sama perbedaan kepentingan menjadi salah satu sumber konflik.

Kepentingan bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, “restu sosial”, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik namun ada juga kepentingan yang bersifat spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu (misalnya keinginan bangsa palestina untuk memiliki tanah air).¹¹ Oleh karena itu dengan adanya kepentingan yang berbeda inilah dalam konflik PKL membuat solusi yang harus dibuat harus mengakomodir semua pihak. Sebab munculnya permasalahan konflik ini juga sangat berkaitan erat dengan kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi yang menjadi daya tarik para PKL untuk konsisten dalam memperjuangkan aktivitasnya di kawasan Taman Pinang.

Konflik wilayah yang menguntungkan secara ekonomi tentu akan berjalan panjang dan semakin memperumit proses penataan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota yang terkenal dengan julukan sebagai kota UKM, dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka perlu ada peran dari para elit pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Memang tidak bisa dielak adanya dinamika yang terjadi antara masyarakat Taman Pinang dengan PKL perlu ada suatu titik temu yang muncul dari pihak pemerintah yang mempunyai legitimasi kuat untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kebutuhan warga maupun para PKL yang bertujuan memperjuangkan kebutuhan ekonominya. Jika adanya dinamika pedagang kaki lima ini tidak bisa diselesaikan secara kebijakan maka posisi pemerintah akan kehilangan legitimasinya.

Peran Elit Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Sekelompok kecil masyarakat mesti ada seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih dari kelompok yang jumlahnya lebih besar. Kelompok yang kecil ini mempunyai kewenangan dan juga kekuasaan yang besar dalam melakukan tindakan yang mereka anggap tindakan itu adalah tindakan yang dapat mempengaruhi kelompok yang besar. Di dalam sebuah kebijakan kelompok kecil sangat berpengaruh terhadap kebijakan apa saja yang sudah ditetapkan dan

¹¹Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, Widya Sarana.

dijalankan dengan baik dan benar. Serta dalam berjalannya sistem pemerintahan pengaruh elit politik sangat mempengaruhi sistem pemerintahan yang baik.¹²

Lahirnya sebuah kebijakan tentu tidak pernah terlepas dari kebutuhan masyarakat yang implementasinya perlu pengawalan dari pemerintah, terkhusus dalam permasalahan konflik pedagang kaki lima di Taman Pinang Sidoarjo. Adanya konflik yang muncul antara warga masyarakat dengan PKL dan ketidakpuasan PKL dengan relokasi pemerintah membuat keadaan semakin berat, sehingga dengan adanya tuntutan yang perlu diakomodir dalam pembuatan kebijakan baru maka peran elit pemerintah yang ada di eksekutif dan legislatif dihadirkan. Dimana kehadiran pemerintah dapat memberikan kebijakan yang mengakomodir semua pihak yang sedang berkonflik dalam proses kegiatan PKL di wilayah Taman Pinang.

Kontrol elit pemerintah dalam penyelesaian konflik Taman Pinang ini sangat diperlukan, terutama sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi dari proses demokrasi yang terselenggara melalui Pilbup dan Pileg di Kabupaten Sidoarjo. Karena bagaimana pun terjadinya konflik ini juga tidak terlepas dari ketidaksepakatan para pedagang atas kebijakan pemerintah melalui Perda No 5 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Kepentingan Umum. Dimana proses implementasinya berupa relokasi pemindahan pedagang yang sebelumnya dari wilayah alun-alun Sidoarjo ke GOR Sidoarjo. Sehingga dengan adanya proses relokasi yang tidak menguntungkan dengan para pedagang akhirnya para pedagang melakukan perlawanan untuk menolak kebijakan tersebut dari informasi yang ada dan hal tersebut berujung pada jejak pendapat antara para pedagang kaki lima dengan anggota dewan Kabupaten Sidoarjo.

Dengan posisi pedagang yang sebelumnya tidak sepakat dengan kebijakan tersebut, akhirnya membuat elit pemerintah harus melakukan pembaharuan atas kebijakan sebelumnya agar dapat tetap mengakomodir kepentingan ekonomi para pedagang kaki lima alun-alun Sidoarjo yang mengalami kerugian setelah mengalami relokasi berpindah tempat berjualan mereka. Karena bagaimana pun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pedagang kaki lima inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya UKM di Sidoarjo, jadi bila kondisi aktivitas sektoral ini terganggu maka hal tersebut juga sangat berpengaruh pada jumlah UKM yang ada di kota tersebut.

¹²Keller, Suzzan. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite : Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL

Adanya perubahan yang dilakukan pemerintah melalui para elitnya akhirnya berdampak pada kebijakan yang baru telah dibuat agar tetap menjaga agar keberlangsungan kegiatan para PKL tetap teromodir haknya. Membahas implementasi kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tentu mempunyai perbedaan dari kebijakan sebelumnya yang intinya hanya memindahkan para pelaku sektor ekonomi informal ini ketempat lain, dan itu sangat berdampak pada pendapatan para pedagang yang sebelumnya mendapatkan penghasilan lebih ketika melakukan aktivitasnya di wilayah alun-alun Sidoarjo. Dan dari keadaan tersebut banyak dari PKL ini yang akhirnya berpindah aktivitasnya di lokasi yang tidak sesuai ditetapkan oleh pemerintah seperti berjualan di taman pinang sehingga akhirnya terjadi konflik dengan para petugas.

Sehingga terkait masalah tersebut pemerintah membuat sebuah kebijakan baru yang berkaitan tentang penataan kota serta yang terpenting adalah pengakomodiran kepentingan PKL dalam berlangsungnya aktivitas sektor perekonomian informal tersebut. Selanjutnya pemerintah memberikan aturan berdasarkan peraturan daerah no. 3 tahun 2016 yang berbunyi tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.¹³ Yang mana dengan adanya kebijakan tersebut maka PKL tidak lagi mengalami penertiban dengan petugas Satpol PP yang sering terjadi pada waktu sebelumnya.

Konsep penataan dan pemberdayaan yang ada pada kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah sidoarjo ini tentu berbeda dengan sebelumnya, dimana melalui kebijakan ini pemerintah mulai memperhatikan penataan agar potensi ekonomi informal ini bisa tetap ada sebagai cikal bakal lahirnya UKM di Sidoarjo. Dengan melakukan sebuah penataan akhirnya elit pemerintah melakukan strategi implementasi dengan melakukan pendataan PKL yang berjualan di beberapa tempat, dimana pendataan tersebut dilakukan untuk menjaga sirkulasi jumlah PKL yang berjualan dan bertujuan untuk menjaga ketertiban.

Di dalam isi perda No 3 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, isi dari bab 3 yaitu membahas tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan para PKL¹⁴.

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan pendataan dari tingkat kecamatan dan kelurahan dengan bersepakat bersama membuatkan jadwal yang sudah di tetapkan bersama-

¹³Dikutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sidoarjo Yang Bersumber Dari sistem jaringan informasi dan informasi hukum Kabupaten Sidoarjo.

¹⁴*Ibid*,

sama. Adanya tahapan tersebut dilakukan oleh elit pemerintah dengan tujuan agar PKL yang ada tetap bisa beraktivitas dan mencegah penambahan jumlah PKL yang datang dari luar kota, sehingga akan berdampak pada ketertiban lalu lintas.

Penetapan lokasi PKL dengan ini membuat lokasi yang strategis dengan cara memperhatikan nilai estetika, ekonomi, keamanan, budaya sesuai dengan perancangan pemerintah dalam melakukan tata wilayah ruang yang baik dengan membuat sentra PKL yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pola dua strategi implementasi kebijakan tersebut diupayakan untuk mencapai keberhasilan sebuah kebijakan. Dan yang pertama melakukan adalah Pendataan PKL dilakukan dengan apartur negara dengan sesuai yang di dalam peraturan daerah dengan menentukan identitas lokasi dan jenis tempat usaha sehingga dapat disesuaikan dengan tempat yang ingin di realisasikan oleh pemerintah daerah.

Kesimpulan

Terjadinya konflik PKL disebabkan oleh ketidak berpihakan kebijakan kepada para pedagang kaki lima dan respon masyarakat sekitar terhadap PKL. Perbedaan kepentingan yang terjadi disebabkan oleh kehadiran Taman Pinang yang digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai wilayah untuk mereka berjualan di kawasan Taman Pinang. Padahal lokasi tersebut adalah perumahan tempat tinggal warga dan juga sebagai salah satu akses tembusan jalan umum menuju kecamatan candi yang dipergunakan untuk kendaraan roda dua dan empat melintas tiap harinya. Maka terjadilah benturan regulasi yang mana lokasi tersebut sebetulnya merupakan jalan umum dan bukan lokasi yang diperuntukan untuk berdagang.

Melihat dari hal tersebut Elit pemerintah hadir dalam melahirkan kebijakan baru yang mengakomodir kepentingan PKL dalam membuat jalan keluar guna menyelesaikan masalah tersebut. Solusi tersebut ialah relokasi, peraturan mengenai relokasi ini disesuaikan dengan peraturan legal format yang telah dibuat oleh pemerintah daerah yaitu guna mewujudkan Penataan dan Pemberdayaan PKL. Walaupun dalam implementasinya pemerintah masih terkesan setengah-setengah karena belum siapnya infastruktur yang memadai dan juga lokasi pengganti yang lebih strategis. Atas hal ini para PKL merasah lokasi taman pinang jauh lebih menguntungkan. Dan pemerintah daerah memang sengaja mengabaikan PKL untuk berjualan hal tersebut karena pemerintah sendiri merasa gagal dalam pelaksanaan implementasi kebijakan itu.

Namun dalam hal ini ada beberapa pihak yang mendasari kepentingan yang menjadi penyebab konflik yang pertama, Pemerintah Sidoarjo melalui Koordinator Perda yaitu Bapak Wakil Bupati yang mempunyai kepentingan secara pribadi untuk melanjutkan diri dalam

Pilkada Sidoarjo selanjutnya oleh karena itu Penataan dan Pemberdayaan PKL dan prestasi selama ini sebagai kota UKM yang akan dia angkat dalam proses pemilihan kepala daerah nanti. Yang kedua, dari pihak Pembina PKL yang ingin mempertahankan legitimasi kepada kelompoknya agar para pedagang tetap menjalankan aktivitas ekonominya di kawasan tersebut. Dengan keikutsertaan jumlah pedagang dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima yang begitu besar, tentu akan berdampak pada majunya perkeekonomian daerah dan juga kontestasi politik mengingat 2019 nanti Pembinaan Paguyuban Pedagang Kaki Lima akan mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 2019 di daerahnya nanti. Yang ketiga, warga masyarakat taman pinang yang selama ini merasa terganggu dengan kehadiran para PKL karena sangat berdampak pada kenyamanan lingkungannya karena menimbulkan kotor yang menyebabkan banjir dan juga kemacetan. Hal itu mendasari warga masyarakat sekitar melakukan perlawanan terhadap PKL di wilayahnya karena pemerintah sendiri tidak bisa memenuhi kepentingan warga masyarakat taman pinang untuk mengatasi para PKL.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik; formulasi, implementasi dan evaluasi*, Bandung: CV Alfabeta.
- Aulia, Sitta, 2012. *Jurnal Politik Muda. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)*: Universitas Airlangga.
- Budiono, Puguh, 2015. *Jurnal Politik Muda. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*: Universitas Airlangga.
- Cindy, Cintatya, 2013. *Skripsi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sidoarjo*: Universitas Negeri Airlangga.
- Keller, Suzzan. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo BAB 3 penataan PKL wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- Ramadhan, Adimas, 2012. *Jurnal Politik Muda. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur*: Universitas Negeri Airlangga.
- Rumpopoy, Tressya, Anita. *Jurnal Politik Muda*. 2012. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo*: Universitas Airlangga.

Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, Widya Sarana.